

# Proyek Pemprov Sulsel Capai 66,58 Persen, Paket yang Sudah Tender di LPSE tembus 247 Paket

Minggu, 29 Agustus 2021 22:23

Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan

**PROGRES PENGADAAN BARANGJASA  
OPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Data Penanggal : 20 Agustus 2021

SUMBER DANA	JMLAH NEGOSIASI/INRIKET Data GRUP Minggu Lalu	JMLAH PAKET (Rp)	Progres Tender Minggu Lalu				Yang Sudah Dibayar Minggu Lalu	Persentase (%)	JMLAH NEGOSIASI/INRIKET (Catat/GRUP Minggu Lalu)	JMLAH PAKET (Rp)	Progres Tender/Winggo Ini				Yang Sudah Dibayar sampai Minggu Ini	Persentase (%)
			Review	Tender	Selesai Tender	Jumlah					Review	Tender	Selesai Tender	Jumlah		
DAK	116	127,400,190,000	0	0	116	116	0	100,00	116	127,400,190,000	0	0	116	116	0	100,00
APBD	260	784,290,230,190	23	32	75	130	130	50,00	254	782,399,232,421	22	28	81	131	124	51,37
JUMLAH	376	911,690,420,190	23	32	191	246	130	65,43	371	909,799,422,421	22	28	197	247	124	66,58

Makassar, Agustus 2021  
Plt KEPALA BIRO PENGADAAN BARANGJASA

**P. R. ANDI BAKTI HARUNI, S.S.S**  
Pangkat : Perwira Utama Harim  
NIP. 1965031 1981 11 1 001

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lelang tender Sulsel mencapai 66,58 persen. Berdasarkan data 20 Agustus 2021 dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemprov Sulsel, sebanyak 247 paket tender yang telah tayang di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Plt Kepala PBJ Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan, total paket tahun 2021 sebanyak 376. Terdiri dari 116 paket yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 260 paket dari APBD.

"Seluruh paket DAK sudah tender. Sebelumnya memang sempat terkendala karena OPD berhati-hati dalam mengeksekusi program," ucap Andi Bakti lewat pesan WhatsApp, Minggu (29/8/2021) malam.

Ia menjabarkan, pagu anggaran untuk keseluruhan proyek DAK senilai Rp 127,4 miliar lebih.

"Persentase tender proyek DAK sudah 100 persen, sudah selesai semua," ucapnya.

Sementara pagu anggaran untuk proyek yang didanai APBD sebesar Rp 784 miliar.

Totalnya ada 260 paket dengan progres 51,37 persen.

Progres tender pada 20 Agustus lalu, ada 22 paket dalam proses review. Selanjutnya 28 paket yang baru tender, dan 81 selesai tender.

"Sehingga ada 131 paket APBD yang ditangani dan telah selesai di PBJ," ujarnya.

Bakti bilang OPD dengan paket tender terbanyak yakni Dinas Pendidikan 100 paket, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) 97 paket.

Selanjutnya Dinas Perikanan dan Kelautan 29 paket, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 27 paket.

Lalu Sekretariat DPRD 17 paket, Dinas Sosial 16 paket, Biro Umum 12 paket, Dinas Kesehatan 8 paket.

Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, Dispora, Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan dan Pertanahan, serta Dinas Kebudayaan Pariwisata masing-masing 5 paket.

Kemudian Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan masing-masing empat paket.

Disusul BPBD, RSUD Labuang Baji RSKD Dadi, Bapenda, masing-masing 3 paket.

RS Gigi dan Mulut, RSUD Sayang Rakyat, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup masing-masing dua paket.

Terakhir, BPSDM, Dinas Perpustakaan dan kearsipan, RS Ibu dan Anak Pertiwi, RS Ibu dan Anak Siti Fatimah, UPTD Transfusi Darah, Disnakertrans, Dinas UMKM, Bappelitbangda, Biro Kesejahteraan dan Inspektorat. (\*)

#### **Sumber berita:**

<https://makassar.tribunnews.com/2021/08/29/proyek-pemprov-sulsel-capai-6658-persen-paket-yang-sudah-tender-di-lpse-tembus-247-paket?page=all>

#### **Catatan:**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi: “Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.”

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fungsi layanan pengadaan secara elektronik berdasarkan Pasal 73 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 2018, antara lain:

1. Pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya.
2. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing).